BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat aktif melakukan kerjasama ekonomi. Tidak hanya dalam forum ekonomi multilateral seperti *World Trade Organization* (WTO), tetapi juga dalam berbagai kerjasama bilateral maupun regional *Free Trade Agreement* (FTA). Sejak krisis Tahun 1997 – 1998, semakin banyak kesepakatan ekonomi yang diikuti oleh Indonesia dalam kerangka FTA regional, seperti ASEAN – China, ASEAN – Eropa, ASEAN – Australia – New Zealand, ASEAN – India, dan lain sebagainya, maupun kerjasama dalam bingkai *Economic Partnership Agreement* (EPA) dengan Jepang, Amerika, Rusia (Khor, 2010:1).

Umumnya, alasan pemerintah untuk lebih agresif dalam berbagai FTA karena strategi FTA dianggap akan menjadi terobosan baru bagi perundingan di forum multilateral yang lamban. Memang, dalam forum multilateral prinsip – prinsip dan perbedaan tingkat kemajuan pembangunan antar negara anggota masih menjadi faktor penting, sehingga masih sangat dipertimbangkan dan diberi peluang untuk diperjuangkan dan dinegosiasikan oleh masing – masing anggota sebelum penyusunan kesepakatan. Sedangkan dalam FTA, terutama dalam FTA bilateral, pertimbangan perbedaan – perbedaan tersebut seolah semakin tipis dan menjadi hambatan yang lebih cepat diselesaikan. Tidak heran bila banyak negara, termasuk Indonesia, yang ingin mempercepat liberalisasi ekonomi akan memilih

memperbanyak kesepakatan FTA dibanding mendorong kerjasama multilateral (Khor, 2010:1-2).

Bagi Indonesia, kerjasama ekonomi pasar bebas bukanlah hal baru, karena liberalisasi ekonomi telah dimulai pada tahun 1983 dengan membuka dan membebaskan pasar uang. Sedangkan liberalisasi ekonomi yang mencakup bidang yang lebih luas, tidak hanya sektor keuangan, diawali pada 2 November 1994. Setelah menghadiri pertemuan di Marakesh pada 14 April 1994, pemerintah Indonesia pada tanggal 2 November 1994 meratifikasi pembentukan WTO dengan menerbitkan UU. 7 Tahun 1994. Kemudian, pada 15 November 1994 Indonesia menjadi tuan rumah dan salah satu inisiator *Bogor Declaration*, yang merupakan awal dari *Asia Pacific Economic Co-operation* (APEC) atau salah satu kerjasama ekonomi regional yang cakupannya sangat luas (Khor, 2010:2-3).

Dalam mendorong liberalisasi ekonomi, Jepang lebih banyak melakukan kerjasama melalui berbagai FTA baik bilateral maupun regional, dibanding aktif dalam forum multilateral. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang dikenal dengan *Economic Partnership Agreement* (EPA). Secara ringkas, EPA merupakan strategi dan kebijakan perdagangan luar negeri untuk mendorong daya saing ekonomi. Tujuan utama Jepang melakukan EPA dengan banyak negara adalah untuk menjamin pasokan energi dalam jangka panjang. Bagi Jepang keterjaminan pasokan energi dan bahan baku akan menjadi kunci untuk mengembangkan dan menjaga daya saing industrinya. Jepang merupakan salah satu negara yang sangat maju di sektor industri manufaktur karena keunggulan sumber daya manusia, teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun, tanpa jaminan energi dan bahan baku,

daya saing jepang sebagai negara industri akan luntur dan digantikan oleh negara – negara industri baru yang memiliki bahan baku dan menguasai energi dan telah berhasil menyiapkan sumber daya manusia dan teknologi (Khor, 2010: 11).

Didalam kesepakatannya bersama dengan Indonesia, antara lain *basic study*, pelatihan, pengiriman tenaga ahli, seminar dan lokakarya. Kegiatan tersebut tentu bukanlah sesuatu yang baru dalam kerjasama Indonesia – Jepang. Sudah sejak lama Indonesia dan Jepang melakukan kegiatan kerjasama ekonomi di sektor industri manufaktur, bahkan juga pengembangan usaha kecil dan menengah. Jika ditelaah lebih jauh sejak 1980 Jepang sangat agresif memberikan *Official Development Assistance* (ODA atau bantuan pembangunan resmi) kepada negara – negara yang akan dijadikan tujuan utama investasi. Dengan strategi ODA, Jepang akan mendapatkan manfaat langsung yakni menekan biaya investasi perusahaan – perusahaan Jepang di negara penerima ODA. Alasannya, dana ODA telah mengarahkan pembangunan fasilitas infrastruktur untuk mendukung bisnis perusahaan – perusahaan Jepang yang akan masuk ke negara penerima ODA. Namun, di era 2000-an, strategi perdagangan dan investasi internasional Jepang telah bergeser dan lebih menekankan pada strategi kerjasama FTA atau EPA, bukan lagi mengandalkan ODA (Khor, 2010: 13).

Dengan strategi yang matang, dukungan pengembangan bagi industri negara – negara mitra pada akhirnya juga akan menguntungkan Jepang. Saran untuk mengembangkan industri di negara – negara mitra, pada dasarnya juga bertujuan untuk mendorong negara – negara mitra menjadi pemasok dan penyedia pasar yang efisien bagi bisnis dan industri Jepang. Karena kemampuan teknologi

dan kepemilikan sumber daya yang relatif sama, negara – negara mitra Jepang tersebut harus bersaing satu sama lain, sementara Jepang bisa mendapat manfaat yang optimal dari persaingan diantara para pemasok tersebut (Khor, 2010:14).

Pada bulan November 2004 disela – sela pertemuan APEC, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan mitranya Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe sepakat untuk membahas kemungkinan pembentukan *Economic Partnership Agreement* (EPA). Hasil pembicaraan tersebut ditindaklanjuti antara Menteri Perdagangan kedua pihak pada bulan Desember 2004. Sebagai langkah awal adalah diadakannya *Joint Study*, melalui *Joint Study Group meeting* (JSG) sebanyak 3 kali pertemuan informal Desember 2004 – Juli 2005) . Hasil JSG merekomendasi manfaat perlunya EPA antara kedua negara berupa *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA), yang kemudian diikuti dengan seri perundingan atau negosiasi sebanyak 6 (enam) putaran sejak Juli 2005 sampai dengan November 2006 (http://www.indonesianembassy.jp/perdagangan/manfaat_epa .pdf).

Pada akhir negosiasi tanggal 24 November 2006 di Tokyo, kedua *Chief Negotiator,* Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Mitoji Yabunaka menandatangani *Record Of Discussion* yang mencakup persetujuan prinsip atas bagian – bagian utama dari 13 kelompok negosiasi dan menyepakati untuk melakukan finalisasi dari perjanjian sesegera mungkin. Kemudian pada tanggal 21 – 22 Juni 2007, telah dilakukan negosiasi akhir dalam kerangka *wrap – up meeting*. Hasil negosiasi tersebut berupa *Record Of Discussion* yang kemudian disepakati oleh kedua *Chief Negotiator,* yaitu Ambassador Soemadi DM

Brotodiningrat dan Mr. Masaharu Kohno, wakil menteri luar negeri. Hasil tersebut sebagai landasan bagi langkah selanjutnya yang akan menyelesaikan *pending issue* dan merapikan *draft* dari sisi bahasa dan hukum (http://www.Indonesian embassy.jp/perdagangan/manfaat_epa.pdf).

Dan pada akhirnya tanggal 20 Agustus 2007 telah ditandatangani kesepakatan kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang dalam kerangka IJEPA oleh kedua negara, yaitu antara Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, yang datang secara khusus ke Indonesia, dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Penandatanganan tersebut menghasilkan beberapa inti dasar dari kerjasama IJEPA yang dilakukan oleh Indonesia – Jepang.

Inti dasar dari kerjasama IJEPA adalah :

1. Memfasilitasi, mempromosikan, dan meliberalisasi perdagangan barang dan jasa antara Jepang dan Indonesia
2. Meningkatkan kesempatan investasi dan mempromosikan aktivitas investasi melalui penguatan perlindungan untuk investasi dan aktivitasnya antara Jepang – Indonesia
3. Menjamin proteksi hak – hak intelektual dan mempromosikan kerjasama di bidang – bidang yang sudah disepakati
4. Meningkatkan transparansi rezim pemerintahan kedua negara dan mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan antara Jepang – Indonesia
5. Mempromosikan kompetisi
6. Mengembangkan lingkungan bisnis diantara kedua belah pihak

7. Membuat sebuah kerangka kerja untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat didalam bidang – bidang yang telah disepakati
8. Menciptakan prosedur yang efektif untuk implementasi dan aplikasi kesepakatan ini untuk resolusi resolusi dari pertikaian yang mungkin muncul dikemudian hari (http://ditjenkpi. depdag.go.id/website_ kpi/Umum/IJEPA/ Basic%20 Agreement %20 %28ID%29.pdf).

Dari 11 bidang atau kelompok perundingan yang dibahas diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang *Trade in goods: tariffs and non-tariff measures, rules of origin trade remedies* (Perdagangan dalam barang : ketentuan tarif, non-tarif, ketentuan asal produk, penyelesaian *dispute* mengenai mutu barang). Perdagangan dalam barang disini adalah ekspor Indonesia ke Jepang di bidang perikanan khususnya di komoditas udang dan tuna.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, luas laut Indonesia lebih besar daripada daratannya. Dengan panjang garis pantai yang sekitar 81.000 km, potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya laut sangat besar (http://binaukm.com/2010/05/potensi-usaha-budidaya-udang/). Tidak heran bila Indonesia bisa menghasilkan perikanan laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagis Kecil, dan lainnya) sekitar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 15.105.011.400, Mariculture (rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta Mutiara sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 567.080.000, Perairan Umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 1.068.060.000, Budidaya Tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 10.000.000.000, Budidaya Air Tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran nilai

US$ 5.195.500.000, dan Potensi Bioteknologi Kelautan tiap tahun sebesar US$ 40.000.000.000. Secara total potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia senilai US$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat digali sekitar US$ 17.620.302.800 atau 24,5 %. Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang serta energi terbaru, serta jasa seperti transportasi, pariwisata bahari yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan (http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridiyo%20kusumastanto.pdf).

Hal inilah yang mendasari mengapa pihak Jepang sangat tertarik untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia dan membuat suatu kesepakatan yaitu IJEPA, dan sebagai bentuk implementasi dari perjanjian tersebut, pada 30 Juni 2008 Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2008. Adapun PMK-PMK tersebut yaitu:

1. PMK No. 94/PMK.011/2008 tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
2. PMK No.95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
3. PMK No. 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) dalam

Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (http://www.indonesia.go.id /id/index.php/content /files/www.bengkulu.go.id/index.php?option=com_content&task=view &id=7730&Itemid=688).

Dengan ditandatangani kesepakatan ini, Indonesia berharap mendapatkan keuntungan dari kerjasama IJEPA. Maka berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

"Implementasi *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) Pada Ekspor Komoditas Udang Dan Tuna Dalam Sektor Perikanan"

Ketertarikan penulis terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa matakuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain :

1. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, mata kuliah ini membantu dalam memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan internasional, konsep-konsep dasar dan umum mengenai Ilmu Hubungan Internasional.
2. Ekonomi-politik internasional membahas keterkaitan sektor ekonomi yang dapat mempengaruhi sektor politik.
3. Hubungan Internasional Asia Pasifik membahas keterkaitan hubungan dua negara di kawasan Asia Pasifik.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan melihat kerjasama kemitraan ekonomi Indonesia – Jepang yang dilakukan dalam bingkai EPA yakni IJEPA disepakati pada tanggal 20 Agustus 2007 dan berlaku efektif 1 Juli 2008 telah mengakibatkan banyak sektor yang menjadi acuan penurunan tarif bea masuk khususnya ekspor dibidang perikanan Indonesia ke Jepang, untuk mengidentifikasi masalah tersebut, maka peneliti merangkumnya dalam beberapa pertanyaan :

1. Faktor apakah yang menjadi latar belakang alasan utama pemerintah Indonesia melakukan kerjasama IJEPA?
2. Upaya – upaya apa saja yang disepakati kedua negara dalam kerangka IJEPA?
3. Kendala apa saja yang menjadi implementasi kerjasama IJEPA?
4. Permasalahan apa saja yang dihadapi pemerintah indonesia di bidang ekspor perikanan?
5. Sejauh mana kerjasama IJEPA khususnya di sektor perikanan membantu nilai ekspor Indonesia?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan, maka berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan memiliki lingkup-lingkup pembahasan terhadap fenomena yang akan diteliti. Sebagai variabel dependen, peneliti akan memusatkan pada impelementasi IJEPA. Sedangkan untuk variabel independen yang dipilih adalah bagi

perekonomian Indonesia pada sektor udang dan tuna. Pembatasan masalah ini berupaya untuk menentukan batas-batas permasalahannya dengan jelas yang memungkinkan untuk mengidentifikasikan faktor - faktor apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup permasalahan.

Penelitian ini akan dibatasi pada kajian terhadap implementasi IJEPA bagi perekonomian Indonesia pada sektor perikanan khususnya komoditas udang dan tuna. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berada dalam kurun waktu tahun 2006 – 2010, karena dalam rentang waktu tersebut penandatanganan *record of discussion* oleh Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dengan Mr. Mitoji Yabunaka dan dilanjutkan oleh negosiasi akhir serta penetapan tentang tarif bea masuk. Pembatasan waktu dilakukan untuk menghindari luasnya rentang waktu yang diteliti sehingga mempermudah penelitian.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dengan berdasarkan hasil uraian dari identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

Bagaimana implementasi yang terjadi atas kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam kerangka *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) khususnya ekspor perikanan pada komoditas udang dan tuna?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan hendaknya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, memahami, dan meneliti berbagai faktor atau alasan pemerintah Indonesia melakukan kerjasama IJEPA dengan pihak Jepang.
2. Mengetahui, memahami, dan meneliti kerjasama – kerjasama yang disepakati dalam kerangka IJEPA.
3. Mengetahui, memahami, dan meneliti kendala – kendala dalam mengimplementasikan kerjasama IJEPA.
4. Mengetahui, memahami, dan meneliti peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Jepang sebelum dan sesudah diadakannya kerjasama IJEPA khususnya di sektor perikanan dalam komoditas udang dan tuna.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan teori-teori ilmu hubungan internasional serta dapat memberikan wawasan bagi para peneliti dan para akademisi ilmu Hubungan Internasional mengenai kebijakan luar negeri suatu negara

yang memiliki pengaruh terhadap negara lain, baik itu dalam kesepakatan maupun kerjasama internasional.

2. Secara Pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional dan menambah wawasan mengenai kerjasama internasional

1.4 Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Definisi Operasional

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Dalam membuat sebuah karya ilmiah, keberadaan teori-teori menjadi sangatlah penting adanya, karena dengan adanya teori-teori tersebut dapat membantu dalam memenuhi kaidah-kaidah keilmuan. Oleh karena itu untuk mempermudah suatu penelitian, penulis menggunakan kerangka konseptual yang akan mengutip dari teori-teori atau pendapat para ahli sehingga menjadi landasan bagi pembangunan hipotesis yang akan diajukan untuk kemudian diuji kebenarannya dalam penelitian ini.

Dinamika Hubungan Internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara-negara yang berdaulat saja, telah mengalami pergeseran, dimana, muncul aktor-aktor lain dalam Hubungan Internasional yang juga mempunyai peranan yang penting.

Banyak pakar yang memberikan pengertian mengenai Hubungan Internasional. DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani

dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”. Menyatakan Hubungan Internasional:

> “Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar”(Perwita&Yanyan, 2005:3-4).

Dalam mempelajari Hubungan Internasional, berbagai aspek dan aktor-aktor dapat dilibatkan. Inti dari Hubungan internasional adalah interaksi yang terjadi antara aktor negara maupun aktor non-negara yang melewati batas negara dan meliputi segala aspek dan bidang. Dalam mempelajari ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar mempelajari ilmu ini, seperti yang disampaikan oleh DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional” yaitu untuk:

> “Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi didalam organisasi internasional” (Perwita&Yanyan. 2005:4-5).

Salah satu konsep dalam hubungan internasional yang juga kembali dibicarakan baik oleh praktisi maupun akademisi Hubungan Internasional adalah konsep regionalisme (Perwita&Yanyan, 2005:103).

Dengan kata lain, negara – negara dalam satu kawasan telah melakukan distribusi kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk tertinggi dari kerjasama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini sendiri terbagi ke dalam dua tingkat, tingkat pertama disebut integrasi dangkal yang hanya mengacu

pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala – kendala dalam perdagangan. Sedangkan bentuk kedua berupa integrasi dalam yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (Perwita&Yanyan. 2005: 108).

Kerjasama Indonesia – Jepang dalam suatu kerangka IJEPA dapat dipelajari dan diteliti melalui Hubungan Internasional, karena dalam hal ini kerjasama IJEPA ini dapat digolongkan sebagai bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang lain, terlebih lagi terjadinya kerjasama IJEPA antara kedua negara ini akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga tidak memungkinkan adanya suatu negara menutup diri terhadap dunia luar.

Didalam Hubungan Internasional, politik luar negeri merupakan alat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya yang merupakan negara lain dalam mencapai, memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya.

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks di dalam dan diluar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu

negara di dalam isu – isu internasional atau lingkungan sekitarnya (Perwita&Yanyan. 2005:47).

Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara – negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral (Perwita&Yanyan. 2005:49).

Kerjasama Bilateral antara Indonesia – Jepang dalam kerangka *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA) secara teoritis, merupakan satu bentuk pengembangan dari konsep kawasan (regionalisme). Regionalisme pada saat ini bisa dibentuk dalam bentuk *pluralisme* atau *bilateral* antara dua negara atau dengan kelompok kawasan lainnya.

Adanya suatu bentuk interaksi dan pengembangan yang dilakukan oleh masing - masing negara akan menghasilkan konsep kerjasama internasional. Kerjasama internasional juga timbul akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Tidak ada suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar dan konsep kerjasama internasional merupakan solusi dari adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh negaranya sendiri.

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat

mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama Indonesia – Jepang dalam kerangka IJEPA merupakan suatu kerjasama ekonomi dimana kedua negara akan saling menguntungkan dengan beberapa ketentuan – ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh kedua negara tersebut. Ketentuan – ketentuan yang berlaku itu tertuang didalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian internasional.

Perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen – instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara – negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini (Mauna, 2001:82).

Pembuatan perjanjian internasional biasanya melalui beberapa tahap yaitu perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Untuk perjanjian bilateral suatu perjanjian mulai berlaku setelah pertukaran piagam pengesahan atau setelah pemberitahuan masing – masing pihak bahwa prosedur konstitusional untuk pengesahan telah dipenuhi (Mauna, 2001:83-84).

Hubungan Indonesia – Jepang dalam kerangka kerjasama IJEPA atau bisa dikatakan sebagai suatu hubungan bilateral yang mempengaruhi suatu

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dimana definisi pertumbuhan ekonomi adalah:

Pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu (Mankiw, 2003:174).

Rumus dasar menghitung pertumbuhan ekonomi dilihat dari perhitungan PDB dimana definisi dari PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu.

Rumus menghitung PDB adalah:

$$Y = C + I + G + NX$$

Keterangan:

- Y adalah PDB yang artinya jumlah konsumsi, investasi, pembelian, dan ekspor bersih.
- C adalah konsumsi yang terdiri dari dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga
- *I* adalah investasi yang terdiri dari barang – barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan.
- G adalah pembelian pemerintah dimana barangd dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat, negara baghian, dan daerah.
- NX adalah ekspor neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain. Ekspor neto menunjukkan pengeluaran neto dari luar negeri atas

barang dan jasa kita, yang memberikan pendapatan bagi produsen domestik (Mankiw. 2003: 24-27).

Dengan adanya perhitungan dari PDB itu sendiri kita bisa melihat nilai ekspor Indonesia dalam melakukan suatu kerjasama dengan negara lain. Dalam hal ini Jepang adalah tujuan utama ekspor perikanan dengan dua komoditi utama yaitu udang dan tuna.

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, penulis menarik sebuah hipotesis sebagai berikut :

Jika kerangka kerjasama IJEPA dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan meningkatkan nilai ekspor perikanan Indonesia ke Jepang pada komoditas udang dan tuna

1.4.3 Definisi Operasional

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan kerjasama suatu negara dengan negara lain dalam bidang tertentu (ekonomi, budaya / sosial, politik, dan pertahanan serta keamanan)
2. *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) merupakan bentuk kerjasama yang mencakup isu tradisional FTA yakni liberalisasi barang dan jasa maupun isu tambahan penting yang

tidak dibahas dalam WTO atau disebut WTO *Plus.*

3. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.
4. Nilai Ekspor merupakan nilai uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu nilai yang tercantum dalam suatu dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PEB).
5. Komoditi udang dan tuna merupakan bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Metode Eksplanatif - Deduktif . Menurut James A. Black dan Dean J. Champion, metode eksplanatif merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel, termasuk pengaruh yang ditimbulkan oleh satu variabel terhadap variabel lainnya. Penjelasan dari suatu penelitian dapat diperoleh apabila hubungan tersebut dapat ditunjukkan (Silalahi, 1999 : 53).

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini

mengasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi tertulis dapat digunakan sebagai indikator sikap, nilai, dan maksud politik dengan cara menelaah secara sistematis menurut kriteria penafsiran kata dan pesan tertentu. Dengan demikian data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi. Bentuk data-data tersebut dapat ditemui pada buku referensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, di samping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 116. Bandung.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar. Bandung.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit. Bandung.
4. Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Jatinangor. Sumedang.
5. Perpustakaan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Jl. Sangkuriang 14. Bandung.
6. Perpustakaan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan, Komplek Bina

Samuder, Jl. Pasir Putih I Ancol Timur. Jakarta Utara.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk pra penelitian (tahap pengenalan, pemahaman dan pendalaman masalah) yaitu dimulai sejak bulan Februari 2011 dan direncanakan selesai pada bulan Agustus 2011. Adapun rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan, penulis jelaskan pada tabel waktu penelitian di bawah ini.

Tabel 1.6.2

Tabel Waktu Penelitian

No	KEGIATAN	Waktu Penelitian						
		2011						
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pencarian Data	■	■					
2	Pengajuan Judul	■	■					
3	Pembuatan Usulan Penelitian	■	■					
4	Seminar Usulan Penelitian			■				
5	Pengumpulan Data	■	■	■	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi	■	■	■	■	■	■	■
7	Sidang							■

1.7 Sistematika Penulisan

Peneliti mencoba menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, indentifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, anggapan dasar dalam hipotesis, definisi operasional, metodelogi penelitian dan teknik pengumpulan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB II : Bab ini memaparkan tinjauan kepustakaan dari literatur-literatur yang dipilih untuk menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti. Merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan: Seperti teori hubungan internasional, politik luar negeri, kebijakan luar negeri, kerjasama internasional. Tinjauan pustaka ini dapat pula berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian yang dapat dijadikan asumsi yang memungkinkan penalaran untuk menjawab masalah yang diajukan.

BAB III : Didalam Bab ini, peneliti akan memaparkan secara umum mengenai implementasi dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang dalam kerangka IJEPA termasuk strategi – strategi yang dipersiapkan oleh Indonesia dalam menjalani kerjasama tersebut.

BAB IV : Merupakan bab analisa tentang seberapa besar implementasi dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan jepang dalam kerangka IJEPA.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan, meliputi penolakan atau penerimaan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengamati objek penelitian yang serupa.